

PARADIGMA POLITIK KLASIK DALAM ILMU POLITIK

Muhtar Haboddin

Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia
muhtar_haboddin@ub.ac.id

Abstrak

Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengenang kembali perdebatan paradigmatis politik klasik dalam ilmu politik. Secara garis besar, dalam perkembangan ilmu pengetahuan ada dua kutub yang saling berhadapan, yakni Thomas Kuhn sangat percaya pada 'penelitian dahulu baru teori' sedangkan Karl Popper malah sebaliknya yakni 'teori dahulu baru penelitian'. Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan 'teori dahulu baru penelitian' yang dianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangat mementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif dengan memusatkan pertanyaan yang bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya).

Kata kunci: paradigma, politik klasik dan ilmu politik

Abstract

This article was written to commemorate the return of classical political paradigmatic debate in political science. Broadly speaking, the development of science there are two poles to each other face to face, namely Thomas Kuhn strongly believe in the 'new research advance theory' whereas Karl Popper on the contrary the 'theory first and research'. Of the two models in the way of thinking suggests that Popper framework that puts the 'theory first and research' approach adopted by the thinkers of classical political science. Adherents of the classical thinkers attach great importance to the theory rather than data; deductive reasoning; his studies with a focus very normative question is das sollen (what should be).

Keywords: paradigm, politics and political science classics.

Jika interpretasi mengharuskan kita melihat ilmu politik sebagai suatu keseluruhan, suatu *corpus* pemikiran, interpretasi juga merupakan suatu cara untuk memecah-mecahkan agar berbagai bagiannya dapat ditangani. Hasilnya diharapkan merupakan suatu perspektif yang lebih manusiawi untuk mendampingi perspektif ilmiah. Syaratnya adalah sedikit kecerdasan, kesabaran yang lebih besar, dan terutama sekali, suatu sentuhan humor.

-David Apter *Pengantar Analisa Politik*; 1988; 524-

Perkembangan ilmu pengetahuan diwarnai oleh dua arus pemikiran besar yang saling berdebat. Perdebatan itu terjadi cukup lama dengan mengedepankan pertanyaan

apakah ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif atau secara revolusioner? Sebuah pertanyaan penting yang senantiasa menguras pikiran para ahli filsafat ilmu, sosiologi ilmu pengetahuan dan para peminat filsafat politik. Para ahli inilah yang bergumul tanpa henti, mencari dan memeriksa karya-karya klasik, dokumen, arsip atau bahkan membongkar pemikiran-pemikiran masa lalu yang pernah dominan dalam kurung waktu tertentu. Hasil akhir dari pencarian dan pergumulan mereka mengenai perkembangan ilmu, ternyata tidak saling menyapa satu sama lain dalam

artian positif melainkan saling bersaing menurut versi masing-masing.

Mohtar Mas'od dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, secara jeli menulis dan memberi penilaian dua perdebatan itu dengan menampilkan pemikir dan sekaligus filsuf kelahiran Wina, Karl Popper (1902-1994). Bagi Popper, ilmu pengetahuan itu berkembang secara rasional dan kumulatif, yaitu melalui proses falsifikasi dan penemuan baru. Dalam proses ini teori-teori dalam bidang keilmuan yang bersangkutan terus menerus dihadapkan pada tes falsifikasi dan semakin banyak teori-teorinya yang lulus tes falsifikasi semakin maju ilmu tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit teori-teori yang lulus tes falsifikasi, tidak dianut. Dengan demikian, keputusan seorang ilmuwan untuk mendukung atau menolak suatu teori yang didasarkan pertimbangan objektif, yaitu apakah teori ilmu lulus atau tidak¹.

Pendapat Popper tersebut, senapas dengan gagasan George Ritzer dan Douglas Goodman. Dalam bukunya yang berjudul *Teori Sosiologi Modern*, Ia menulis sebagai berikut:

Menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan mengatakan bahwa kemajuan ilmu terjadi secara kumulatif, setiap tahap kemajuan tanpa terelakkan dibangun di atas seluruh kemajuan yang telah dicapai sebelumnya. Ilmu yang mencapai tingkat kemajuan yang sekarang melalui

¹ Mohtar Mas'od. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm.11.

kenaikan atau tambahan pengetahuan yang terjadi secara terus-menerus. Demikianlah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan ketingkat yang lebih tinggi².

Pandangan Karl Popper, George Ritzer dan Douglas Goodman yang melihat perkembangan ilmu dengan cara kumulatif, ditentang habis oleh Thomas Kuhn, sang penulis buku legendaris *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). Kuhn menentang konsep yang menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif. Menurutnya pandangan demikian itu mitos yang disebarkan-luaskan oleh buku-buku teks sebelumnya yang selalu *vested interest* untuk menampilkan citra yang masuk akal tentang bidang studi mereka. Lebih lanjut, Kuhn, mengatakan kenyataan sejarah tidak mendukung konsepsi Popper itu. Pandangan Kuhnian menunjukkan bahwa ilmu lebih banyak berkembang melalui 'kesepakatan' para ilmuwannya. Apakah teori diterima atau ditolak ternyata bukan ditentukan semata-mata oleh pertimbangan rasional, yaitu kekuatan logikanya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan irrasional, yaitu kesepakatan dalam komunitas ilmuwannya.³

Sanggahan Kuhn terhadap Popper mengenai perkembangan ilmu pengetahuan patut diberi tiga catatan

² George Ritzer dan Douglas Goodman *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. A-12; Lihat pula George Ritzer *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 4; Ian Crain. *Teori-Teori Sosial Modern*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada), 1994.

³ Mohtar Maos'ed., *op.cit.* hlm.11.

penting. Pertama, dari perdebatan mereka, kita bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dari dua sisi yang berbeda dan saling berlawanan/bertentangan. Kedua, perbedaan cara pandang menunjukkan bahwa latar belakang keilmuan sang tokoh berpengaruh secara signifikan dalam melihat persoalan. Kuhn menjelaskan ilmu pengetahuan dengan pemahaman ilmu alam, empirik. Sementara Popper lebih menekankan filsafat ilmu, dan normatif. Ketiga, cara berpikir Kuhn berangkat dari 'fakta' sementara Popper berangkat 'teori'. Atau meminjam istilah Mohtar Mas'ood, Kuhn sangat percaya pada 'penelitian dahulu baru teori' sedangkan Popper malah sebaliknya yakni 'teori dahulu baru penelitian'.

Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan 'teori dahulu baru penelitian' yang dianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangat mementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif dengan memusatkan pertanyaan yang bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya). Sebagai ilustrasi pendekatan politik klasik bergerak dari idealis ke empirik. Dan, Plato merupakan ilmuwan yang konsistensi menggunakan pendekatan normatif dalam uraiannya mengenai negara yang ideal.⁴

Tulisan ini ingin membedah metodologi pendekatan politik klasik dengan menampilkan beberapa bagian.

Mulai dari teori dahulu-baru penelitian, berpikir deduktif dan normatif, apa yang menjadi objek kajiannya, lalu ditutup dengan implementasi pendekatan klasik di Indonesia.

Teori Dulu-Baru Penelitian.

Pendekatan klasik merupakan warisan pemikiran dari Eropa. Salah satu ciri khas dari pemikiran Eropa adalah orientasi teoritik yang sangat kuat. Karl Popper adalah penganut teoritik yang sangat kuat dan menekankan cara kerja keilmuan yang mendahulukan teori baru penelitian. Karl Popper, sebagaimana dikutip Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa cara paling efektif untuk memajukan pengetahuan saintifik adalah melalui pengembangan gagasan dan percobaan untuk menolak gagasan itu melalui penelitian empirik. Ia tidak percaya bahwa penelitian empirik yang sistematis bisa menimbulkan teoritisasi. Penelitian tidak bisa menimbulkan gagasan baru dan tidak bisa berfungsi sebagai metode logis untuk membentuk teori. Menurut penganut aliran ini, teori hanya bisa diciptakan melalui intuisi dan renungan mendalam. Dalam proses ini kita mula-mula hanya melakukan abstraksi pikiran dan berusaha membuat 'gambar' yang sejelas mungkin dalam pikiran kita dan berusaha menarik sebanyak mungkin kesimpulan atau konsekuensi dari gambar yang kita buat. Sementara kita sedang dalam proses membuat gambar itu kita tidak berpikir kaitan empirik antara gambar itu dengan dunia nyata, baru sesudah gambar itu

⁴ A. Hoogerwerg *Politikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.22.

cukup jelas, kita mengujinya dengan fakta empirik⁵.

Pandangan di atas didukung Kennet Waltz. Waltz mengatakan, tidak mungkin melakukan penelitian dengan strategi induktif, karena tanpa teori kita tidak mungkin tahu dimana mau memulainya, data apa yang akan dicari, dan sebagainya. Tanpa suatu teori yang jelas, tidak mungkin dilakukan pengujian dengan sempurna dan banyak waktu akan terbuang percuma. Korelasi bukanlah teknik yang baik untuk membuat teori yang eksplanatoris, korelasi adalah teknik deskriptif. Pengetahuan hubungan internasional' tidak akan bisa dihasilkan hanya dengan mengakumulasi informasi sebanyak-banyaknya⁶.

Komentar Waltz tidak hanya melanjutkan tradisi Popper. Tetapi Waltz tengah mengembangkan pemahaman 'teori dulu baru penelitian' dalam studi hubungan internasional. Sedangkan dalam studi ilmu politik muncul gagasan yang mengejutkan sebagaimana ditulis Fred N Kerlinger dalam *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Ia mengomentari para penganut teori dulu baru penelitian dengan mengatakan para pemikir klasik biasanya dijuluki sebagai

ilmuwan yang kerjanya berpikir, memintal teori-teori rumit; dan menghabiskan banyak waktunya di menara gading yang terpencil dari dunia beserta masalah-masalahnya. Ilmuwan adalah teoritis yang tidak praktis, kendati pemikiran dan teorinya sesekali membuahkan hasil yang mengandung makna praktis⁷.

Penilaian Kerlinger tentu saja ada benarnya. Karena itu, para ilmuwan klasik terus berbenah diri sembari memperbaiki metode risetnya. Salah satu karya yang berpegang pada teori dulu-penelitian kemudian ditulis David dan Chava Nachmias dalam *Research Methods in the Social Sciences* (1981). David dan Chava Nachmias sebagaimana dikutip Mohtar Mas' oed menggambarkan strategi 'teori dahulu-penelitian kemudian' dalam tahap-tahap berikut:

Pertama, perumusan suatu teori atau metode yang eksplisit. Kedua, pemilihan suatu proposisi yang muncul dan teori atau model untuk diteliti secara empirik. Ketiga, pembuatan rancangan penelitian untuk menguji proposisi. Keempat, kalau proposisi yang dideduksi dari teori itu didukung oleh data empiris, maka teori atau penelitian (seperti disain penelitian, pengukuran, dan sebagainya) harus diubah, dan kita harus kembali ke tahap ke-2. Kelima, kalau proposisi itu ditolak, kita cari proposisi lain untuk diuji atau kita coba perbaiki⁸

⁵ Mohtar Mas' oed., *op.cit.* hlm.82. Karl Popper adalah pengecam yang paling lantang suaranya terhadap peneliti yang mendahulukan penelitian dulu baru teori. Dalam penelitian hal ini biasa disebut dengan metode induktif. Akar dari persoalan induktif terdapat dalam pernyataan David Hume bahwa tidaklah mungkin untuk membenarkan suatu dalil/teori melalui eksperimen, oleh karena hal itu 'transcends experiens'. Lebih lanjut baca J Vredendregt. *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*, (Jakarta: Gramedia, 1985). Khusus Bab.1.

⁶ *Ibid.* hlm.83.

⁷ Fred N. Kerlinger. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, (Jogyakarta, UGM Press, 1990), hlm.11

⁸ Mohtar Mas' oed., *op.cit.* hlm.82. Periksa pula Suwarsono dan Alvin Y So Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: LP3ES, 2006). khusus

Penjelasan yang memposisikan teori dulu-kemudian penelitian berangkat dari pemaknaan yang mendasari bahwa teori merupakan jantung dari penjelasan ilmiah dan otomatis menjadi sentral dalam penelitian ilmiah. Sifat abstrak yang dimiliki teori membuatnya tidak mungkin dibuktikan kebenarannya, namun diuji kegunaannya. Sebab kebenaran teori menurut bahasa Riswandha Imawan adalah 'kebenaran logikanya'.

Berpikir Deduktif dan Normatif

Selain mendahulukan teori, pendekatan klasik juga terkenal dengan metode berpikir yang sangat deduktif dan normatif. Cara berpikir deduktif dan normatif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu politik klasik itu sendiri. Berbagai ilmuwan politik membenarkan hal ini. Sebut saja namanya Ronald H. Chilcote dalam *Teori Perbandingan Politik* (2003); Riswandha Imawan dalam *Metode Penelitian Ilmu Politik* (2000); Hoogerwerf dalam *Politikologi* (1985); Mohtar Mas'ood dalam *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (1994); Ichlasul Amal dan Budi Winarno dalam *Metodologi Ilmu Politik* (tanpa tahun); dan Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweit dalam *Konsep dan Metode Analisa Politik* (1986).

Dalam pendekatan politik klasik nalar deduktif bekerja mengutip pendapat Ronald H Chilcote dengan analisa deduktif yang menyertakan kasus-kasus khusus di

bawah hukum penjelasan yang universal. Analisa bergerak dari yang umum menuju yang khusus, dan deduktif mengisyaratkan bahwa kesimpulan satu fakta akan dijelaskan melalui sebuah generalisasi. Dengan demikian, sebuah kejadian hanya dapat dijelaskan dalam hubungan dengan sebuah hukum umum yang baku atau generalisasi empiris. Hukum atau generalisasi seperti ini dideduksi dari kelompok generalisasi atau teori yang lebih tinggi, dan kesemuanya secara logika dipegang bersama-sama. Selain itu, para ilmuwan sosial maupun para filsuf keilmuwan biasanya mendasarkan penjelasan-penjelasan mereka pada penjelasan deduktif⁹.

Penggalan kutipan Chilcote terasa terlalu panjang dalam memaknai bagaimana nalar deduktif itu bekerja dalam suatu mekanisme penelitian. Tanpa mengurangi bobot keilmiahannya penulis menampilkan logika dedutif secara ringkas, padat dan penuh makna sebagaimana dikemukakan Riswandha Imawan. Menurut Riswandha: Pendekatan klasik berangkat dari logika deduktif. Dimana peneliti mulai dengan seperangkat teori, menjabarkannya ke dalam seperangkat variabel, pengumpulan data, lalu menguji apakah data yang terkumpul itu menyokong atau tidak teori yang dipakai. Jadi, pendekatan ini menitikberatkan pada proses *theory justification*, menguji apakah satu teori dapat atau berguna menjelaskan satu fenomena¹⁰.

⁹ Ronald H. Chilcote *Teori Perbandingan Politik*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 85.

¹⁰ Riswandha Imawan, 'Metode Penelitian Ilmu Politik' Diktat, 2000. hlm. 1

Pengujian teori sangat penting dilakukan. Sebab sebagaimana dikatakan Popper kemajuan keilmuan hanya bisa dicapai melalui proses perumusan hipotesa dari teori, pengujian hipotesa itu, dan berdasar hasil pengujian itu dilakukan perumusan kembali atau penolakan atas hipotesa itu¹¹. Sementara Daniel Dhakidae mengatakan ilmu pengetahuan hanya bisa berkembang bila suatu penemuan ditolak lantas dicari gantinya. Ilmu hanya bisa berkembang kalau suatu penemuan diterima dan dipakai sampai suatu saat ia lekang terkuras zaman, dan hilang kemampuannya menjelaskan soal. Karena itu sikap—tolak –terima rasional oleh *the scientific community* adalah pangkal gerak kemajuan di dalam kultur keilmuan¹². Pemahaman ini diperkuat lagi oleh pemikiran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang dibangun melalui pendekatan deduktif yang didasarkan pada logika formal dan matematik, harus dapat diuji dan dibuktikan secara empirik¹³.

Nalar deduktif sebagaimana disebutkan di atas berbarengan dengan nalar normatif dalam pendekatan politik klasik. Jika nalar deduktif menitikberatkan pada proses *theory justification*, menguji apakah satu teori dapat atau berguna

menjelaskan satu fenomena. Maka nalar normatif memusatkan pada apa yang seharusnya yang menjadi tujuan dalam ilmu politik. Karena itu, nalar normatif bisa dibaca dan dipelajari hasil karya para tokoh-tokoh pemikir mulai dari Thucydides, Hugo Grotius, Immanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx, Plato, Leo Straus, Eric Voegelin dan sebagainya

Dalam Teori Perbandingan Politik, Ronald H Chilcote mengatakan bahwa nalar normatif merupakan pendekatan favorit bagi ilmuwan politik yang perhatian utamanya adalah tentang sejarah gagasan-gagasan politik dan sosiologi ilmu pengetahuan. Pendekatan normatif merupakan kecenderungan klasik yang sudah digunakan sejak ilmu politik masih menyatu dengan filsafat. Pendekatan ini meneliti nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat yang dianggap baik. Ia juga menelaah norma dalam bentuk aturan-aturan kehidupan atau seperangkat prinsip tentang hak dan kewajiban yang membimbing kita mempraktekkan nilai-nilai. Analisis normatif mencoba meningkatkan observasi empirik kasar atas berbagai peristiwa, dan mencari makna-makna yang lebih dalam dengan mengaitkan nilai-nilai masyarakat yang diamati. Analisis normatif menggunakan masyarakat secara keseluruhan sebagai unit analisisnya, dan terkadang mereka mengasumsikan bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi dari suatu proses dialektika antara nilai-nilai dan gagasan yang saling

¹¹ Mohtar Mas' oed., *op.cit.* . hlm.84.

¹² Daniel Dhakidae 'Spes dan Secercah Harapan' dalam VEDI Hadiz Politik, *Budaya dan Perubahan Sosial* . (Jakarta: Gramedia dan Yayasan Spes, 1992). hlm.xvi.

¹³ Yusuf Hadi Miarso 'Landasan Berpikir dan Pengembangan Teori dalam Penelitian Kuantitatif'. *Jurnal Pendidikan Penabur* No.05/Th-IV/Desember 2005. hlm.66.

bertentangan¹⁴.

Kalimat yang bernada: analisis normatif menggunakan masyarakat secara keseluruhan sebagai unit analisisnya menunjukkan kesamaan dengan nalar deduktif. Yakni kecenderungannya berpikir secara global. Kendati demikian, nalar normatif bergerak lebih maju dalam artian berusaha keluar dari perdebatan tentang pengujian teoritik, lalu mencari nilai-nilai moral dan politik dengan mencoba membumikan penyelidikan teorinya.

Bahwa nilai-nilai moral dan politik dimana diperoleh? Tidak menjadi soal. Karena nilai-nilai moral dan politik kebanyakan disediakan oleh dunia sekelilingnya. Dalam hubungannya dengan spektrum tujuan-tujuan moral dan politik yang luas, teoritisi lebih menyerupai seorang 'organisor' dari pada seorang 'pencipta'¹⁵. Lepas dari apakah teoritisi normatif sebagai seorang 'organisor' ataupun 'pencipta'. Yang jelas, ada juga pengamat mengatakan bahwa disebut sebagai nalar normatif karena kesimpulan-kesimpulan yang diberikannya tentang bagaimana pemerintah harus dibuat baik dan dilaksanakan.

Penjelasan nalar normatif yang berkuat pada persoalan nilai-nilai moral dan politik adalah warisan pemikiran filsafat politik dari dulu hingga sekarang tetap relevan untuk dibicarakan dalam konteks pemikiran politik klasik. Pemikiran politik

klasik tidak pernah usang dibicarakan karena pertanyaan yang diajukan oleh pemikirnya sangat filosofis dan kontekstual, mengutip pendapat Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweit, yang mengatakan bahwa; Ilmu perbandingan politik terus menaruh perhatian dalam hal memperbandingkan struktur, fungsi dan hubungan di berbagai negara. Hubungan internasional memusatkan perhatian pada masalah tradisional tentang cara bagaimana negara berinteraksi. Ia menelaah seperti perang damai, sistem internasional yang saling tergantung dan kebijakan laur negeri. Pelajaran hukum ketatanegaraan juga menunjukkan perhatian pada dasar-dasar hukum pemerintah seperti proses perundang-undangan yang merupakan turunan dari perhatian awal untuk meneliti secara mendalam struktur dan berfungsinya lembaga-lembaga tersebut.¹⁶

Pandangan pemikiran politik klasik semacam ini dikritik oleh John Dewey. Kritik Dewey menarik untuk disimak karena ia mengatakan bahwa pemusatan perhatian pada deduktif dan normatif tentang bagaimana timbulnya negara, bukan tentang apa konsekuensi negara dan akibatnya sekarang. Secara signifikan, perhatian para ilmuwan bergeser pada konsekuensi negara, dan mereka menemukan bahwa kebanyakan dari mereka sangat tidak puas akan efek-efek lembaga yang telah dideskripsikan sedemikian mendetail oleh pendekatan

¹⁴ Ronald H. Chilcote., op.cit . hlm. 27.

¹⁵ Ichlasul Amal dan Budi Winarno. *Metodologi Ilmu Politik* , (Jogyakarta, PAU-UGM, (tanpa tahun)., hlm. 107.

¹⁶ Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz *Konsep dan Metode Analisa Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986). hal. 19.

klasik ini¹⁷.

Objek Kajian Pendekatan Klasik

Dimensi yang bernalar normatif dan deduktif sedikit telah disinggung. Karena itu bagian ini mencoba melakukan penajaman konsepsi pendekatan klasik ketika dijadikan pisau analitis dalam memotret objek persoalan. Pertanyaan-pertanyaan yang berbau filosofis yang ditopang dengan nilai-nilai, norma dan fakta sulit dipisahkan. Mengapa demikian? Karena dalam pendekatan klasik nilai dan fakta saling terkait. Selain itu, fokus kajiannya juga bergerak pada struktur-struktur formal (institusi dan pemerintah).

Perhatiannya pada lembaga-lembaga formal nampak dalam komentar Miriam Budiardjo dalam *Demokrasi di Indonesia*. Ia menulis:

“Seandainya pendekatan klasik ingin mempelajari parlemen maka yang dibahas adalah wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya seperti yang tertuang dalam naskah resmi (Undang-undang dasar, UU, atau peraturan tata tertibnya; hubungannya formalnya dengan lembaga eksekutif; struktur organisasi atau hasil kerjanya (berapa Undang-undang yang telah dihasilkan)¹⁸.”

Pandangan Miriam paralel dengan Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz, yang mengatakan bahwa sebagai besar studi menelaah struktur legal yang formal dan proses pemerintahan secara terperinci. Sumber data studi ini adalah catatan-catatan

tertulis seperti statuta konstitusi. Dengan pertanyaan pertanyaan apakah pemerintah berstruktur dan berfungsi sebagaimana ditunjukkan oleh dokumen tertulis. Karena itu, Somit dan Tanehaus berkata periode ini cenderung legalistik, deskriptif dan formalistik¹⁹.

Baik Miriam Budiardjo maupun Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz sama-sama saling menguatkan. Ketiga ilmuwan ini melihat pendekatan klasik dalam kaca mata struktur kelembagaan dengan berpijak pada kajian konstitusi. S.P. Varma dalam *Teori Politik Modern*, secara panjang lebar menguraikan terjadinya perubahan dalam pendekatan klasik. Lebih jelasnya simak kutipan berikut:

Penekanan pada awalnya struktur-struktur formal, secara berlahan-lahan mulai membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang terarah secara fungsional. Suatu perhatian yang lebih besar kini juga tengah diberikan kepada pengaruh aktivitas berbagai organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok sosial terhadap aktivitas pemerintah. Ruang lingkup ilmu politik tidak lagi terbatas pada filsafat politik dan deskripsi kelembagaan. Kini terdapat suatu kecenderungan yang lebih besar dalam meneliti lembaga-lembaga dan organisasi. Juga terdapat penekanan yang semakin besar kepada apa yang digambarkan sebagai peneliti terhadap suatu sistem dalam keadaan beraksi,

¹⁷ *Ibid.*, hlm.13.

¹⁸ Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 1999), hlm.57.

¹⁹ Mary Grisez Kweit dan Robert W Kweitz., op. cit. hlm.12; Ronald Chilte.op.cit. hlm. 78; Miriam Budiardjo, op.cit. hlm. 58.

terhadap cara-cara kerjanya, sebagaimana juga kepada sumber-sumber serta urutan-urutan resmi suatu pemerintahan. Dengan penekanan yang baru, generalisasi yang baru serta pengertian-pengertian yang semakin kritis tentang cara kerja suatu pemerintahan, yang akan membawa kita kepada rasa tidak puas terhadap perangkat konseptual dan teknik dari ilmu politik yang ada, serta menekankan kebutuhan akan adanya kerangka konseptual dan peralatan teknis baru untuk meneliti tentang cara kerja dari suatu pemerintahan²⁰.

Kutipan panjang ini sengaja penulis hadirkan kepada sidang pembaca. Sebab dengan cara ini kita bisa mengetahui bahwa usaha pembaharuan objek kajian pendekatan klasik telah diusahakan. Pembinaan tidak hanya terjadi pada level objek tetapi juga merambah pada konseptualisasi hingga teknik penelitian. Tujuannya tak lain adalah supaya bisa menjelaskan model dan struktur kelembagaan lebih canggih.

Sekalipun sudah terjadi penambahan dan perluasan ruang lingkup cakupannya sebagaimana dijelaskan Varma. Namun, tetap saja ada hal penting yang terlupakan yakni pertanyaan normatif-filosofis di seputar usaha mereka mencari esensi ide-ide politik seperti keadilan dan kebaikan; mempetimbangkan apa itu pemerintah yang baik, apa itu kedaulatan, apa yang merupakan kewajiban negara terhadap negara dan sebaliknya kewajiban negara terhadap warga negara.

Pertanyaan-pertanyaan ini lahir bersamaan dengan pendekatan politik klasik. Karena itu, menghadirkan pertanyaan itu bukan berarti membangkitkan romantisme masa lalu. Sama sekali tidak. Tetapi itulah *blue print* pendekatan klasik. *Blue print* ini harus memuaskan kepada pemikir, disamping menyakinkan para pembacanya.

Implementasi Pendekatan Klasik di Indonesia.

Jika pertanyaan yang diajukan apakah masih relevan pendekatan politik klasik di Indonesia? Maka jawabnya tentu saja iya. Mengapa, karena ada banyak studi maupun laporan media massa menunjukkan kuatnya pendekatan klasik yang berorientasi pada pengkajian struktur maupun fungsi lembaga-lembaga formal. Misalnya, Miriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia (1995); Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia (1992); Tim S2 PLOD Reaktualisasi Fungsi Legislatif (2006); dan Bivitri Susanti dkk., Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan. Menurut Bivitri Susanti dkk. Ada dua hal yang dibahas dalam kajian. Pertama, struktur pembagian kerja. Kedua, struktur pengambilan keputusan. Pilihan dua hal ini didasarkan pada keberadaan DPR sebagai lembaga politik dalam struktur ketatanegaraan dan sebagai lembaga legislatif dengan fungsi-fungsi. Yang menarik dari temuan Bivitri dkk adalah sebagai berikut:

²⁰ S.P. Varma. *Teori Politik Modern*, Jakarta, (Rajawali Press, 1995), hlm. 9-10.

Struktur DPR, baik struktur dalam hal pembagian kerja maupun pengambilan keputusan, seharusnya didasarkan pada peran dan fungsi DPR sebagai lembaga politik. Oleh karena itu, beberapa konsep mengenai keberadaan alat kelengkapan seperti Baleg dengan perannya yang baru serta keberadaan pimpinan alat kelengkapan harus ditinjau kembali.²¹

Peninjauan kembali seharusnya bukan secara parsial yakni keberadaan Baleg dan alat kelengkapan tetapi juga mengenai struktur pembagian kerja maupun pengambilan keputusan DPR secara keseluruhan. Hal ini dimungkinkan karena pada tataran implementasi DPR tidak bisa menjalankan fungsi yang melekat pada dirinya sebagaimana diatur dalam UU. No.22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Ketidakmampuan DPR dalam menjalankan fungsinya nampak dalam laporan beberapa media massa. Kompas misalnya secara tegas menulis kurang optimalnya fungsi pengawasan dan legislasi DPR. Fungsi pengawasan tumpul. Selama satu tahun ini tidak ada pengawasan yang serius dilakukan DPR. Selain tumpulnya fungsi pengawasan, DPR juga terkesan lamban dalam menjalankan fungsi legislasinya. Hal ini terlihat dari tidak optimalnya proses pembuatan undang-undang yang berhasil diselesaikan²².

Sementara pada akhir bulan Desember tahun 2006 Kompas menyebutkan adanya kecenderungan ketidakpuasan masyarakat terhadap kemampuan DPR menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah dari 70,2 menjadi 79,2 persen. Sedangkan keraguan akan kemampuan DPR mengeluarkan undang-undang juga meningkat dari 66 menjadi 71,5 persen²³.

Lebih lanjut Litbang Kompas melalui jajak pendapatnya 25-26 Oktober 2005 terungkap tingginya responden yang berpendapat bahwa kinerja DPR buruk. Yaitu, 83% dari 887 responden di 10 kota besar. Angka ini meningkat dari 78% pada September 2005, 58% pada bulan Juli 2005, 56% pada Januari 2005, dan 59% pada Desember 2004.

Bila dikaji lebih lanjut, memang banyak masalah dalam DPR yang menyebabkan buruknya kinerja mereka. Dan salah satunya masalah mendasar yang perlu disoroti adalah struktur DPR. Penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengenai kinerja legislasi DPR periode 1999-2004 yang menyoroti dua masalah yang harus diperhatikan legislatif mendatang, yaitu, pertama, pembagian peran komisi dan baleg; kedua, perbaikan prosedur²⁴.

Sebagai contoh, penggunaan prosedur RUU inisiatif tidak lagi memerlukan dukungan dari sekurang-

²¹ Bivitri Susanti dkk 'Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan', Draft Laporan 23 November 2005. hlm. 45.

²² Kompas, 2 Januari 2007; 'DPR Ideal Menawarkan Gagasan' Kompas, 12/11/2005; News Letter FITRA, edisi 2/Tahun 1/2002.

²³ Kompas, 18/12/2006; bandingkan Stephen Sherlock 'Proses Legislatif di Parlemen Indonesia: Isu, Permasalahan dan Rekomendasi', (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung), 2005.

²⁴ Bivitri Susanti dkk., op.cit.

kurangnya dua fraksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang. Hal yang sama juga bisa digunakan dalam penggunaan hak meminta keterangan atau interpelasi dengan penyederhanan prosedur. Hak ini dapat dipakai jika pembicaraan dalam rapat kerja dengan pemerintah kurang efektif atau mengalami *deadlock* seperti yang sering terjadi. Sekalipun rapat kerja sudah jauh lebih efektif daripada DPR yang lalu, akan tetapi suatu interpelasi akan menjadikan sistem politik lebih transparan dan dengan demikian masalah accountability dan pengawasan terus menerus terhadap pemerintah dapat ditingkatkan.

Apa yang penulis tampilkan, sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya kajian politik klasik di tanah air. Sorotannya yang tajam pada fungsi dan struktur lembaga DPR menjadi bukti bahwa peminat kajian politik klasik cukup diminati. Inilah realitas

yang ada dan tengah berlangsung dalam peta dan cakrawala pemikiran di Indonesia.

Simpulan

Patut untuk dicatat bahwa pendekatan klasik mempunyai sumbangsih dan mewarnai khazanah perkembangan ilmu politik. Cara berpikirnya yang dimulai dengan teori lebih dahulu merupakan salah satu ciri khas pendekatan ini. Ilmuwan seperti Karl Popper, Kennet Waltz dan David dan Chava Nachmias adalah representasi dari pendekatan ini.

Ketika ilmuwan telah memilih salah satu perspektif, mereka cenderung untuk mengembangkan pola pikir tertentu, dan berpendapat bahwa teori tersebut merupakan teori yang terbaik. Akibatnya, ilmuwan sosial cenderung untuk tidak menghargai teori yang lain, dan tidak jarang melakukan kritik tajam.²⁵

Daftar Pustaka

- Apter, David. 1977. *Pengantar Analisa Politik*. LP3ES. Jakarta
- Amal, Ichlasul dan Winarno, Budi. (tt) *Metodologi Ilmu Politik*. PAU-UGM. Jogyakarta
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- Chilcote, Ronald H. 2002. *Teori Perbandingan Politik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Crain, Ian. 1994. *Teori-Teori Sosial Modern*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Dhakidae, Daniel. 1992. 'Spes dan Secerch Harapan' dalam *Vedi Hadiz Politik, Budaya dan Perubahan Sosial*. Gramedia dan Yayasan Spes. Jakarta
- Hoogerwerg. A. 1985. *Politikologi*. Erlangga. Jakarta
- Imawan, Riswandha. 2000. 'Metode Penelitian Ilmu Politik' Diktat.

²⁵ Periksa pula Suwarsono dan Alvin Y So *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 1

- Kerlinger, Fred N. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. UGM Press. Yogyakarta
- Kweit, Mary Grisez dan Robert W Kweitz. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Bina Aksara. Jakarta
- Mas'oe'd, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media. Jakarta
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali. Jakarta
- Sherlock, Stephen. 2005. 'Proses Legislatif di Parlemen Indonesia: Isu, Permasalahan dan Rekomendasi. Friedrich Nauman Stiftung. Jakarta
- Suwarsono dan Alvin Y So. 2006. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. LP3ES. Jakarta
- Varma, S.P. 1995. *Teori Politik Modern*. Rajawali Press. Jakarta
- Vredenburg, J. 1985. *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-Ilmu Empiris*. Gramedia. Jakarta
- Sumber Lain.**
- Jurnal Pendidikan Penabur No.05/Th-IV/ Desember 2005.
- Bivitri Susanti dkk 'Struktur DPR yang Merespon Peran dan Fungsi Lembaga Perwakilan', Draft Laporan 23 November 2005.
- Kompas*, 2/1/2007; *Kompas*, 12/11/2005; *Kompas*, 18/12/2006
- News Letter FITRA, edisi 2/Tahun 1/2002.